



Strategi Pemberantasan Korupsi



Don't want to corrupt
BY ENFORCEMENT
 (efek jera / takut korupsi)



Can't corrupt
BY PREVENTION
 (perbaikan system / Sulit korupsi)



Dare not corrupt
BY EDUCATION
 (membangun nilai / Enggan korupsi)



PUBLIC PARTICIPATION



INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia

Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.
6 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi



point
37
 urutan
 ke **102**
 dari 180
 negara
 tahun
 2020

Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN



Sumber: Transparency International Indonesia





Fenomena Gunung Es

Grand and Political Corruption

Petty Corruption

Corruptive Behaviour



GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 10TH EDITION

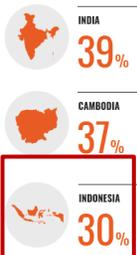
ASIA 2020

Conducted between March 2019 and September 2020, the GCB Asia is one of the largest, most detailed surveys of citizens' views and experiences of corruption and bribery in Asia. The results highlight issues of vote-buying, sextortion and the use of personal connections to access public services.

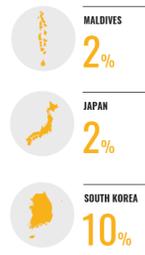
BRIBERY RATES BY COUNTRY*

* Percentage of public service users who paid a bribe in the previous 12 months.

HIGHEST



LOWEST



PERSONAL CONNECTIONS RATES BY COUNTRY*

* Percentage of public service users who used personal connections in the previous 12 months.



TI's Global Corruption Barometer - Indonesia



BRIBERY AND PERSONAL CONNECTION RATES*

*Based on people who used these public services in the previous 12 months.

	BRIBERY	PERSONAL CONNECTIONS
Overall rate	30%	36%
Public schools	22%	32%
Public clinics and health centres	10%	19%
Identity documents	31%	36%
Utilities	13%	28%
Police	41%	27%
Courts*	-	-

*The contact rate for courts was too low to generalise for the entire population.

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER (GCB) 2020

Alasan memberikan uang atau pemberian lain



Karena diminta: **25%**



Ditawari agar layanan lebih cepat/lebih baik: **21%**



Tidak diminta tapi biasanya diharapkan memberi: **17%**



Tidak diminta, sebagai 'ucapan' terima kasih: **33%**

25% Supply-side
71% Demand side,
atau setidaknya ada
pada control pemberi

PERSEPSI VS PENGALAMAN



SPAK 2021: Dimensi persepsi lebih buruk dari pengalaman (3,83 vs 3,9), tetapi ada peningkatan

SPAK 2018-2021: Dimensi persepsi **memburuk**, sedangkan pengalaman meningkat

- Aspek perilaku menjadi penting untuk diintervensi karena semakin tinggi toleransi publik terhadap korupsi, semakin besar kecenderungan publik memberikan uang/fasilitas melebihi ketentuan manakala berhubungan dengan layanan publik.
- Tingginya toleransi dan angka yang tidak merasa keberatan menyebabkan publik enggan menolak atau melapor

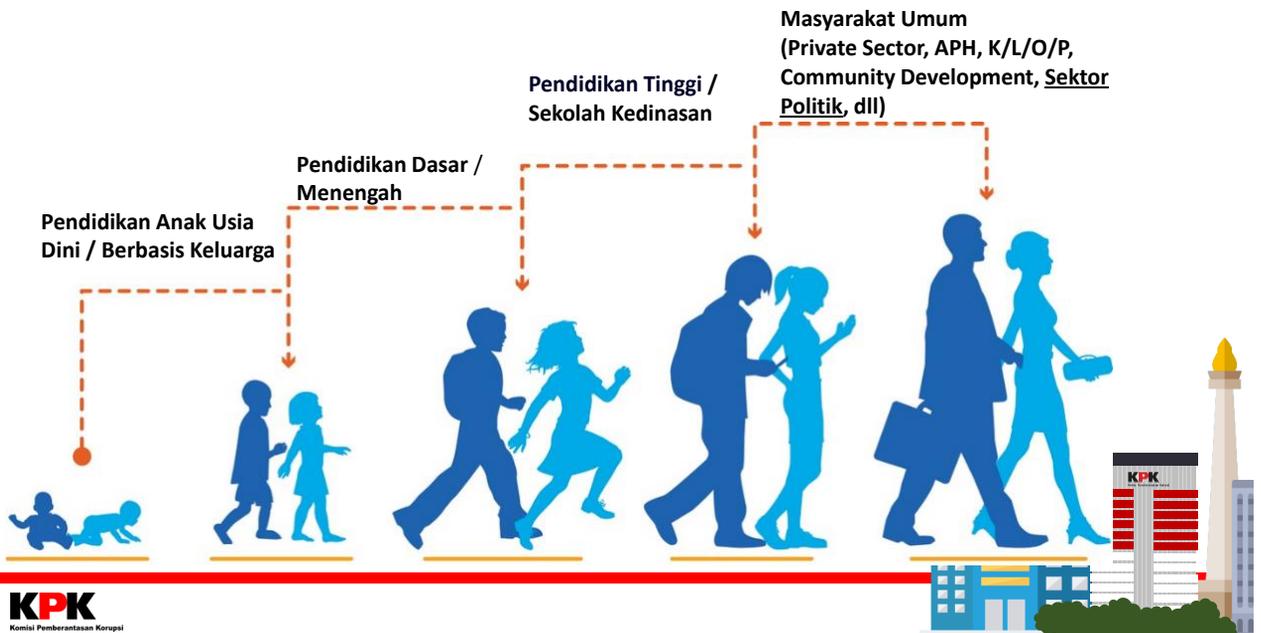
Tusi Jejaring Pendidikan

Menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi pada Setiap Jejaring Pendidikan



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEPANJANG HAYAT



Strategi Implementasi PAK

TIDAK INGIN KORUPSI

Integrasi pada MP/MK existing, MK/MP mandiri, Penugasan pada MP/MK, KKN/Tugas Akhir tema Antikorupsi, dsb

Inseri PAK pada Kurikulum



Menghasilkan lulusan, personal pendidikan, dan jejaring pendidikan berintegritas

Pembangunan Integritas Ekosistem Pendidikan

Perilaku individu pendidikan terhadap sistem pendidikan, kebiasaan dalam ekosistem, keteladanan, perilaku hubungan individu/ lembaga dalam ekosistem pendidikan, dsb



Metode Inseri Mata Pelajaran

- Menyisipkan materi antikorupsi di kompetensi social dalam KI dan KD yang ada

Metode Habitasi dan Pengkondisian Lingkungan Sekolah

- Budaya sekolah yang diterapkan di sela kegiatan belajar

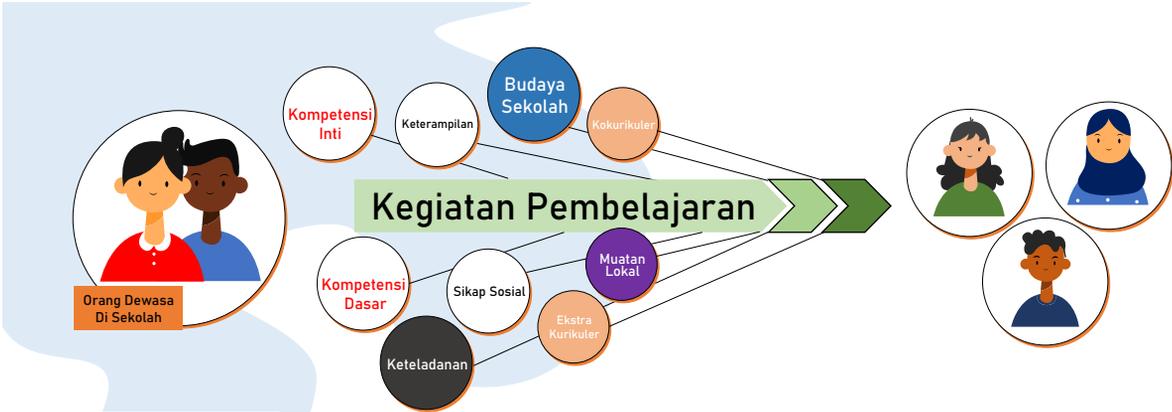
Metode lainnya

- Kegiatan kreatif, keagamaan, ataupun kegiatan sosial

Metode Mandiri/Muatan Lokal

- Menggunakan konteks kebutuhan daerah





- Eksplisit Kurikulum** Mengacu dari kurikulum nasional, kompetensi inti dan dasar, mengasah keterampilan dan sikap sosial
- Ko-Eks-Kurikuler** Kegiatan pengayaan dalam dan di luar kegiatan pembelajaran
- Muatan Lokal** Menggunakan konteks kebutuhan daerah sebagai pembelajaran > berdampak di keseharian
- Budaya Sekolah** Pengondisian lingkungan sekolah sebagai ruang belajar langsung dan tidak langsung
- Keteladanan** Menjaga sikap semua orang dewasa di lingkungan sekolah **Sering dilupakan!**



9 NILAI ANTIKORUPSI / INTEGRITAS



INISIATIF PENDIDIKAN ANTIKORUPSI



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI



Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan pada 11 - 12 Desember 2018.



Menghasilkan komitmen dan rencana aksi "Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi", yang ditandatangani oleh:

- 1) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Kementerian Agama;
- 4) Kementerian Dalam Negeri;
- 5) Komisi Pemberantasan Korupsi.



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

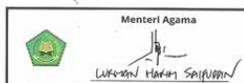


BERANI
JURUK
HEBAT!**KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI**

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN :

1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan; dan
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik.

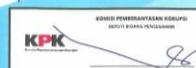
Jakarta, 11 Desember 2018

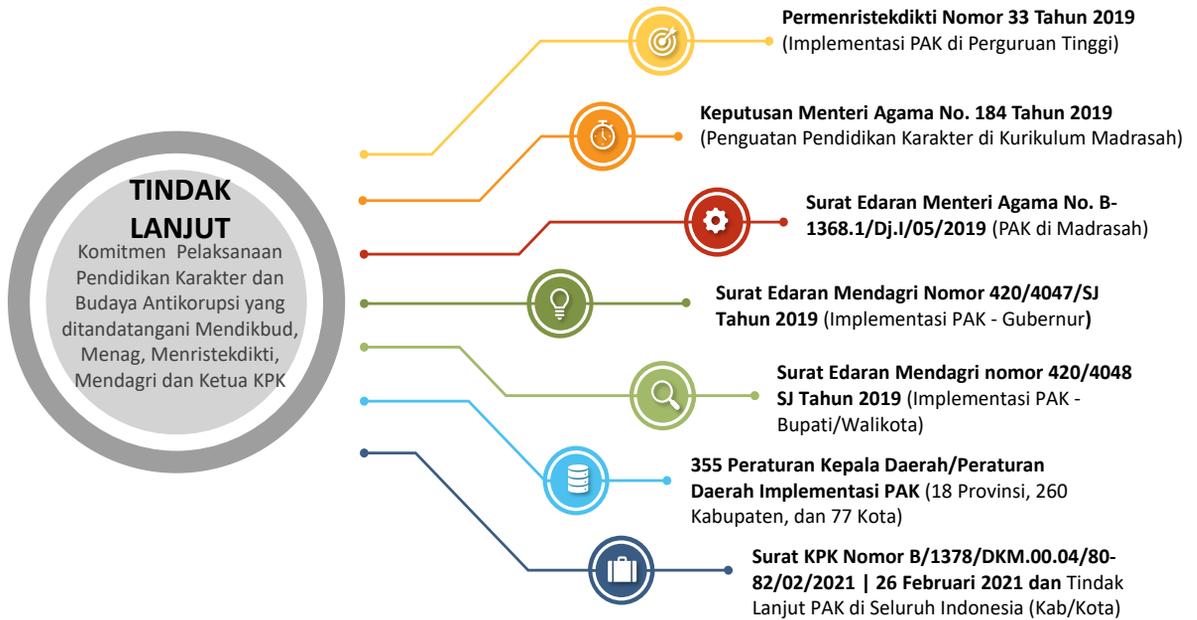
BERANI
JURUK
HEBAT!**RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI**

KAMI, SELAKU PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERSAMA-SAMA BERKOMITMEN UNTUK :

1. Menyusun kebijakan yg mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 2019;
2. Menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi di setiap jenjang Pendidikan;
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;
4. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus / pokja yang memadai dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
5. Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dan penerapan Tata Kelola Pendidikan yang bersih dan Baik;
7. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta penerapan Tata Kelola yang Bersih dan Baik di setiap jenjang Pendidikan;
8. Mendorong Tata Kelola Pendidikan Yang Bersih dan Baik melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan
9. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK.

Jakarta, 11 Desember 2018





Skema Pembelajaran Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi

Cakupan	Tata Nilai	Tata Kelola	Tata Sejahtera
Penetrasi			
Pengetahuan			
Keyakinan			
Tindakan			

Diadopsi dari presentasi Bpk. Yudi Latif, Ph.D. saat FGD Integritas Ekosistem Pendidikan





Ing Ngarso Sung Tulodho
Ing Madyo Mangun Karso
Tut Wuri Handayani



Indiatoday.in

Pembelajaran Berbasis Proyek "Olah-Karsa Membangun Sikap"

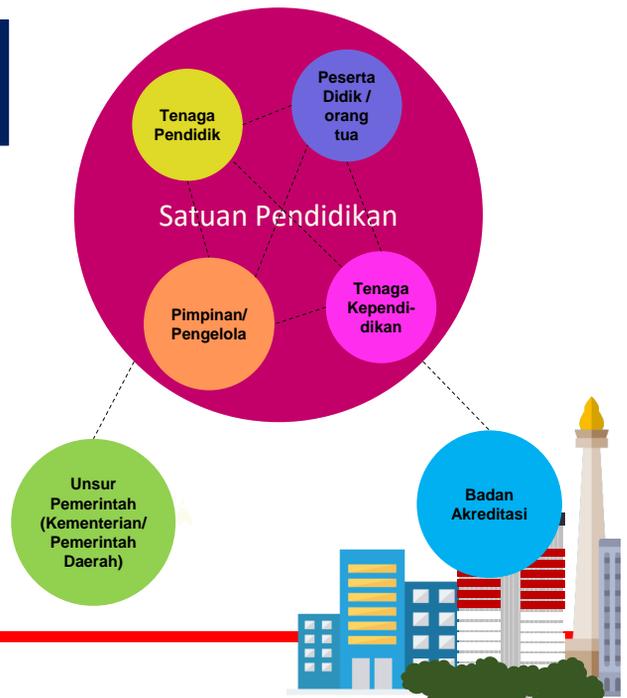


<https://nuoriyrittajyys.fi/en/2019-en/goals-project-solves-global-challenges-with-students/>



Inisiasi 2021 Instrumen Pengukuran Integritas Ekosistem Pendidikan

- Indeks Integritas Ekosistem Pendidikan** adalah indeks yang mengukur ketersediaan perangkat yang mendorong perilaku berintegritas dan praktiknya pada satuan pendidikan, termasuk dalam interaksinya dengan berbagai elemen (jejaring) pendidikan.
- Interaksi yang dimaksud mencakup lingkup internal satuan pendidikan, dan dengan pihak eksternal



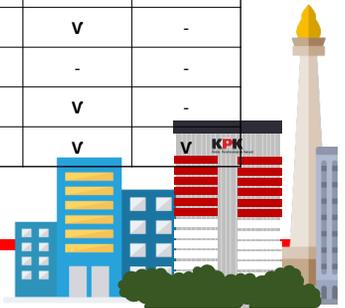
Asesmen Integritas Ekosistem Pendidikan

PENGALAMAN INTEGRITAS	PEMBANGUNAN INTEGRITAS*
Dengan Survei	Dengan Cek Dokumen oleh Pakar
Siswa / Mahasiswa	Komponen Inti
Guru / Dosen	Instrumen → Kode Etik, Kebijakan COI/WBS
Pimpinan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi	Struktur → SK Pelaksana : Perorangan, Satgas, atau Unit
Orang Tua Siswa	Proses / Prosedur → SOP, Perencanaan & Penganggaran, Laporan Tindak-lanjut/Monev
	Komponen Pelengkap
	- Hasil akreditasi/asesmen
	- Hasil audit

* Adopsi OECD Integrity Framework

Aspek Pengukuran

NO.	ASPEK	RESPONDEN						
		SISWA	ORANG TUA	GURU	KEPALA SEKOLAH	MAHASISWA	DOSEN	REKTORAT
1	GRATIFIKASI	V	V	V	-	V	V	V
2	KONFLIK KEPENTINGAN	-	V	V	-	V	V	V
3	SALAH GUNA WEWENANG	V	V	-	V	V	V	-
4	TRANSPARANSI	V	V	V	V	V	V	V
5	AKUNTABILITAS	V	V	V	V	V	V	-
6	KEJUJURAN	V	V	V	V	V	V	-
7	KEPEDULIAN	V	-	V	V	V	V	-
8	KEDISIPLINAN	V	-	V	-	V	-	-
9	KETELADANAN	V	-	V	-	V	V	-
10	IMPLEMENTASI PAK	V	-	V	V	V	V	V



ON PAPER/SISTEM INTEGRITAS EKOSISTEM		
CORE PARAMETER		
No	Parameter	Contoh Dokumen
A	Dokumen bukti implementasi PAK di Sekolah (Kurikuler, Ko-Kurikuler, Ekstra Kurikuler)	Peraturan Implementasi yang dikeluarkan Pemda, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, RPP, SK Penunjukan Guru PAK, Dokumentasi kegiatan pembelajaran (laporan evaluasi akhir)
B	Peraturan integritas bagi sivitas Sekolah	Panduan atau peraturan sekolah yang memuat poin sesuai pertanyaan, Prosedur/Tata Cara/Sanksi, SK pelaksana, contoh penegakan seperti laporan
C	Kebijakan Anti-Gratifikasi bagi sivitas sekolah	Panduan atau peraturan sekolah yang memuat poin sesuai pertanyaan, Prosedur/Tata Cara/Sanksi, SK pelaksana, laporan penegakan
D	Kebijakan Pengelolaan Konflik Kepentingan bagi sivitas Sekolah	Panduan atau peraturan yang memuat poin sesuai pertanyaan, Prosedur/Tata Cara/Sanksi, SK pelaksana, laporan penegakan
E	Kode Etik/Perilaku bagi sivitas sekolah	Panduan atau peraturan yang memuat poin sesuai pertanyaan, Prosedur/Tata Cara/Sanksi, SK pelaksana, laporan penegakan
F	Adanya saluran pengaduan	Panduan atau peraturan sekolah yang memuat poin sesuai pertanyaan, Prosedur/Tata Cara/Sanksi, SK pelaksana, laporan penanganan pengaduan (Statistik yang sudah selesai)
G	Program Sosialisasi dan kampanye antikorupsi melalui berbagai media (dijelaskan bentuknya termasuk induksi, dan untuk semua sivitas)	Peraturan atau SE Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah, Dokumen pelaksanaan sosialisasi, poster, dll
NON-CORE PARAMETER		
No	Parameter	Contoh Dokumen
H	Transparansi/publikasi informasi keuangan (rencana dan realisasi anggaran sekolah, termasuk bantuan operasional, hibah dll)	Disampaikan saat pertemuan/rapat sekolah-orang tua, ditempel di sekolah, diunggah di website sekolah
I	Transparansi/publikasi informasi keuangan bantuan orang tua siswa melalui komite sekolah	Disampaikan saat pertemuan/rapat komite sekolah-orang tua, ditempel di sekolah, diunggah di website sekolah
J	Nilai Akreditasi BAN-S/M	Nilai indikator tata kelola
K	SOP Layanan Kependidikan di Dinas Pendidikan	Peraturan, SOP Pelayanan Kependidikan oleh Dinas Pendidikan
L	Adanya aturan yang jelas terkait mekanisme kepala sekolah yang transparan dan akuntabel	Peraturan, SOP Pemilihan Kepala Sekolah dari Pemda/Dinas Pendidikan
M	SOP (Panduan, Transparansi, Publikasi) Penerimaan siswa Baru	
N	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	
O	SOP Rekrutmen, Mutasi, Rotasi dan Promosi SDM Sekolah (Guru, Guru Honorer, Tenaga Kependidikan/Staf TU)	



Tujuan

Responden

1. Menilai efektivitas/*gap* antara ketersediaan perangkat integritas dan implementasinya
2. Memperoleh masukan perbaikan/peningkatan berdasarkan indikator hasil penilaian

KPK

Menjadi masukan dalam perbaikan/peningkatan program/intervensi integritas di sektor pendidikan

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



Pelayanan Informasi Publik

Telp: 198

Email: informasi@kpk.go.id

Websites:

www.kpk.go.id

www.acch.kpk.go.id

www.aclc.kpk.go.id

Social media

 @KPK_RI

 @ official.kpk

 KPK RI

Terima Kasih

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

